

BAB V

KESIMPULAN

Kemiliteran di Indonesia didirikan secara spontanitas oleh rakyat. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan bahwa tidak semua prajurit tentara pada awal kemerdekaan merupakan mantan anggota militer Belanda dan Jepang. Inisiatif dan spontanitas rakyat untuk mendirikan organisasi tentara kebangsaan karena situasi dan kondisi negara pada saat itu sedang dalam keadaan gawat. Hal ini dikarenakan oleh masih adanya pasukan Jepang di Indonesia dan masuknya pasukan sekutu yang memboncengi pasukan belanda ke Indonesia. Sebenarnya rakyat pada waktu tersebut tidak begitu mencemaskan kedatangan sekutu karena tujuan awal mereka hanya untuk membawa keluar pasukan Jepang sebagai tawanan perang, akan tetapi karena pasukan sekutu tidak datang sendirian, mereka juga mengikut sertakan pasukan Belanda dalam rombongannya, pasukan belanda ini memiliki keinginan untuk dapat kembali menguasai Indonesia.

Rakyat terus mendesak pemerintah untuk secepatnya membentuk organisasi tentara kebangsaan. Pemerintah setelah melalui rapat bersama dengan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, memutuskan mendirikan Badan Keamanan Rakyat. Akan sebagian besar rakyat merasa kecewa sebab BKR bukanlah organisasi tentara kebangsaan melainkan Korps Pejuang Bersenjata. BKR bukan merupakan organisasi tentara kebangsaan, hal ini dikarenakan bahwa pemerintah berupaya menghindari terjadinya pertentangan dengan pasukan Jepang dan Sekutu. Sebagian rakyat yang merasa kecewa dengan pemerintah pada akhirnya memutuskan membentuk badan-badan perjuang yang lebih dikenal dengan istilah

laskar. Rakyat yang baik bergabung dengan BKR maupun badan-badan perjuang bersama-sama melucuti senjata pasukan Jepang, merebut tempat-tempat strategis yang dikuasai oleh pasukan Jepang serta melawan pasukan sekutu beserta pasukan Belanda

Fungsi BKR hanya sebatas menjaga keamanan di daerah masing-masing. BKR tidak hanya terdiri dari unsur darat saja akan tetapi juga unsur laut maupun udara akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa yang lebih dominan dalam melaksanakan tugas yaitu BKR dari unsur darat. Tidak adanya komando terpusat yang mengatur BKR maupun badan-badan perjuangan membuat seringnya terjadi kesalahpahaman baik antar anggota BKR dengan anggota BKR, anggota badan-badan perjuangan dengan anggota badan-badan perjuangan, dan juga anggota BKR dengan anggota badan-badan perjuangan.

Banyak permasalahan yang terjadi di dalam tubuh BKR dan berdirinya organisasi badan-badan perjuangan di luar organisasi resmi pemerintah. Hal ini membuat pemerintah memutuskan untuk mendirikan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945. Secara resmi berdirinya TKR sehingga dari sinilah lahirnya organisasi tentara kebangsaan. Perengkrutan anggota TKR diserahkan oleh pemerintah kepada mantan anggota KNIL Mayor Jenderal Urip Sumoehardjo. Banyak pemuda yang mendaftarkan diri untuk dapat menjadi anggota TKR sehingga divisi-divisi yang terbentuk pun menjadi melebihi dari yang semula direncanakan. Nama Tentara Keamanan Rakyat diganti menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Namun nama Tentara Keselamatan Rakyat tidak berlangsung lama, pemerintah pada tanggal 26 Januari 1946 mengeluarkan

maklumat tentang pergantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Tujuan dari pergantian nama ini yaitu untuk memperbaiki susunan dan bentuk ketentaraan yang lebih sempurna, hal ini terdapat dalam Surat Penetapan Pemerintah No.4/SD/1946. Usaha pemerintah untuk menyempurnakan organisasi tentara kebangsaan terus dilakukan walaupun kondisi negara sedang dalam keadaan perang. TRI merupakan organisasi tentara reguler buatan pemerintah tapi tidak semua badan-badan perjuangan yang mau bergabung. Akhirnya pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan agar TRI dan badan-badan perjuangan bersatu dalam satu wadah. Proses penyatuan ini cukup memakan waktu hampir satu tahun. TNI baru resmi berdiri pada tanggal 3 Juni 1947. TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata dan Polri.

Baru sebulan resmi terbentuk, TNI harus kembali berperang dalam menghadapi agresi militer belanda yang pertama (21 Juli 1947). Agresi Militer Belanda I terjadi karena kegagalan perjanjian Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda. Dalam menghadapi agresi militer belanda I, TNI melakukan berbagai strategi antara lain memperhebat infiltrasi dan memperkuat Backfornt (pertahanan garis belakang), memperkuat ekonomi perang, weerbaarmaking penduduk, membangun sistem pertahanan dalam bentuk wehrkreise dan melengkapi persenjataan TNI.

Agresi militer belanda II menjadi sorotan dunia Internasional, sehingga diadakannya kembali perundingan antara Indonesia dengan belanda. Dari perundingan tersebut melahirkan perjanjian Renville. Akan tetapi sekali lagi Belanda melanggar perjanjian dengan melancarkan agresi militer II. TNI dalam menghadapi agresi militer belanda yang ke-II (19 Desember 1948) membagi dua Markas Besar Komando untuk mengatur strategi perang yaitu Markas Besar Komando Djawa (MBKD) dan Markas Komando Sumatera (MBKS).

MBKD berada dibawah pimpinan Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD) Kolonel A. H. Nasution. MBKD membawahi empat Divisi (Divisi I Jawa Timur yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono, Divisi II Jawa Tengah bagian timur yang berpusat di Solo dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto, Divisi III Jawa Tengah bagian barat yang berpusat di Magelang dipimpin oleh Kolonel Bambang sugeng dan Divisi IV/ Siliwangi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Daan Yahya) dan tiga Daerah Militer Istimewa (Daerah Militer Istimewa I meliputi daerah Surabaya, Malang dan Kediri, Daerah Militer Istimewa II meliputi Solo, Semarang, Pati, Bojonegoro dan Madiun, dan Daerah Militer Istimewa III meliputi Kedu, Banyumas, Pekalongan dan Yogyakarta). MBKS berada dibawah pimpinan Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera (PTTS) Kolonel Hidayat. MBKS membawahi empat subteritorium.

Corps Polisi Militer merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia. Cikal bakal Corps Polisi Militer yaitu Polisi Tentara. Polisi Tentara dibentuk bersamaan dengan pembentukan divisi-divisi dalam organisasi TKR. Polisi Tentara memiliki tugas yaitu sebagai penegak hukum di lingkup militer dan juga

sebagai pengawas disiplin tata tertib dalam kemiliteran. Polisi Tentara juga memiliki tugas tambahan yaitu sebagai pengawal VVIP Presiden, Wakil Presiden, Pejabat Negara serta tamu kehormatan yang berkunjung ke Indonesia. Polisi Tentara terbagi dalam tiga angkatan bersenjata. Di dalam angkatan darat dinamakan Polisi Tentara Angkatan Darat, Polisi Tentara Angkatan Laut, Polisi Tentara Angkatan Udara. Seiring dengan penyempurnaan TKR menjadi organisasi tentara kebangsaan, Polisi Tentara juga menyempurnakan organisasinya dengan cara menyatukan semua bagian Polisi Tentara kedalam satu wadah Corps Polisi Militer. Hari jadi Corps Polisi Militer pada tanggal 22 Juni 1946, dimana Presiden Soekarno meresmikan pataka gajah mada sebagai ciri khas dari CPM yang membedakan dengan kesatuan lain.